



# LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI  
PAPUA BARAT

# 2022

INTEGRITAS – INDEPENDENSI – PROFESIONALISME



**Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi Papua Barat**

Jl. Sowi Gunung No. 3 Manokwari-Provinsi Papua Barat



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.....	4
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Papua Barat.....	5
D. Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.....	7
E. Sumber Daya Keuangan.....	7
F. Isu Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PAPUA BARAT.....	9
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Papua Barat.....	9
B. Perjanjian Kinerja TA 2022 BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.....	11
C. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN PAPUA BARAT (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA PERWAKILAN PAPUA BARAT).....	12
A. Hasil Evaluasi AKIP.....	12
B. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
C. Analisis Efisiensi.....	19
D. Perubahan Budaya Kerja.....	19
E. Realisasi Anggaran.....	20
F. Inovasi.....	21
BAB IV PENUTUP.....	22

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat dapat menyusun dan menyampaikan Laporan atas Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan rencana strategis (renstra) BPK RI –yaitu Renstra 2020-2024.

Renstra BPK RI periode 2020-2024 telah ditetapkan untuk memberikan arah dan strategi dalam mencapai visi dan misi BPK. Penerapan renstra telah dilengkapi dengan sistem manajemen kinerja BPK (SIMAK) yang merupakan instrument yang mampu menterjemahkan strategi ke dalam level operasional melalui indikator kinerja utama (IKU), inisiatif strategis level BPK dan satker, serta fasilitas *scorecard* yang berfungsi untuk mengukur dan memonitor pencapaian target kinerja level BPK-Wide maupun level satuan kerja.

Melalui penyusunan renstra, BPK berkomitmen untuk melaksanakan prioritas yang penting terkait dengan misi BPK dan sekaligus responsif dengan lingkungannya. BPK juga menyadari bahwa tanpa suatu aktivitas untuk mengelola kinerja organisasi, eksekusi rencana strategis umumnya akan berakhir dengan kegagalan. Hal tersebut yang mendasari BPK-sejak tahun 2008 menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis *scorecard* yang didesain untuk menterjemahkan renstra ke dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja (satker) pelaksana BPK.

Sistem manajemen kinerja (SIMAK) BPK juga berfungsi untuk menyelaraskan prioritas-prioritas satker pelaksana dengan prioritas Badan. Komponen dalam SIMAK BPK yang terdiri dari peta strategi, *scorecard*, indikator kinerja utama, dan *dashboard view* dirasakan telah cukup lengkap untuk mengejawantahkan sasaran strategis BPK ke dalam sasaran dan target pelaksana. Dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia, SIMAK BPK memungkinkan BPK untuk tidak hanya melakukan monitoring atas pencapaian tahun lalu/historis, tetapi juga untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di BPK, penyebabnya, serta opsi-opsi yang tersedia untuk mengambil kebijakan terkait perubahan dan tantangan tersebut.

Secara garis besar, capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk tahun 2022, adalah sebesar 97,09%. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang baik, meski beberapa IKU masih belum tercapai sepenuhnya sebagai berikut.

- a. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan mencapai 76,67% dari target yang ditetapkan yaitu 100%;
- b. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan mencapai 70,13% dari target yang ditetapkan yaitu 75%;
- c. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK mencapai 4,62 dari target yang ditetapkan yaitu 5,00;
- d. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi mencapai 93,79% dari target yang ditetapkan yaitu 97%;
- e. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan mencapai 87,50% dari target yang ditetapkan yaitu 100%;
- f. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas



- Komunikasi mencapai 3,77 dari target yang ditetapkan 3,80; dan
- g. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi mencapai 98,80% dari target yang ditetapkan yaitu 100%.

Terdapat 3 Indikator Kinerja yang mencapai target yang telah ditetapkan atau sama dengan target yang telah ditetapkan, yaitu IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan mencapai target 100% dan terdapat 3 Indikator Kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu:

- a. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional mencapai target 101,77% melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%;
- b. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan mencapai 100,40% atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%;
- c. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal mencapai target 100,48% melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%;
- d. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP mencapai 89,84 atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 88,00;
- e. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran mencapai 90,69% atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 88,00%.

Berdasarkan hasil penilaian diatas, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat masih perlu memberikan perhatian terhadap beberapa hal penting antara lain Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, rekomendasi yang ditindaklanjuti, pemahaman pegawai terhadap visi misi dan nilai dasar BPK, Tingkat pemanfaatan TI, Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi dan persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan. Pencapaian hal tersebut memerlukan kerja keras dari BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat agar dapat mencapai hasil yang lebih baik pada periode selanjutnya.

Pada akhirnya, tugas BPK sebagai lembaga Negara yang mendapat mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, hanya dapat dilaksanakan dengan mewujudkan BPK yang independen, berintegritas, dan profesional. Di masa mendatang, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan terus meningkatkan perannya menjadi pelopor keteladanan (*leading by example*) dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Manokwari, Januari 2023  
Kepala Perwakilan



Patrice Lumumba Sihombing S.E., M.M., Ak., CSFA, CA  
NIP. 196908141997031006



## BAB I PENDAHULUAN

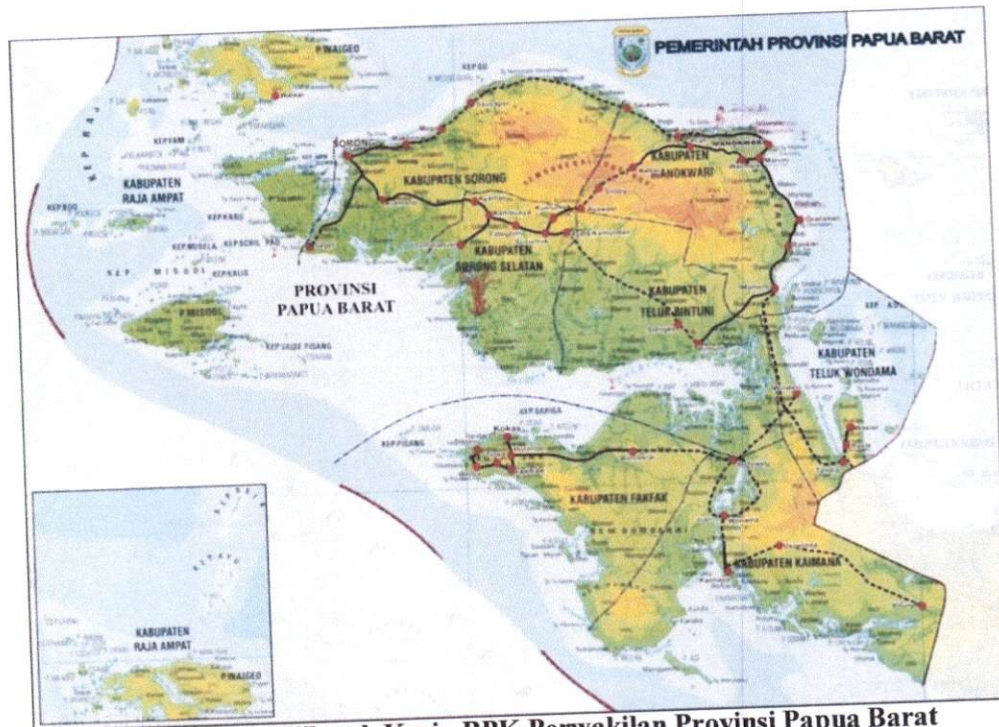
### A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Sementara itu, penerapan di lingkungan internal BPK salah satunya didukung dengan Surat Keputusan Sekjen BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana BPK. Laporan Kinerja (LAKIN) BPK disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

### B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK mendirikan kantor perwakilan di tiap provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi. BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu unit kerjanya adalah BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama VI). BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melakukan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. Saat ini BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat memiliki 14 entitas pemeriksaan pemerintah daerah (1 Pemerintah Provinsi, 1 Pemerintah Kota, dan 12 Pemerintah Kabupaten).





**Gambar 1 Peta Wilayah Kerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat**

Pada gambar di atas terlihat bahwa, wilayah kerja (pemeriksaan) BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi dari sisi transportasi yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya karena kondisi geografis yang meliputi jajaran kepulauan dan pegunungan dalam wilayah provinsi Papua Barat. Namun kondisi tersebut tidak mengurangi tekad BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana telah diuraikan di atas. Untuk menjalankan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain merumuskan dan mengevaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana aksi perwakilan, menyusun program pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta kegiatan-kegiatan lain terkait pemeriksaan seperti pemberian penjelasan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dll.

### C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Papua Barat

Berdasarkan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dengan membawahi tiga unit kerja sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Sekretariat Perwakilan Provinsi Papua Barat terdiri dari 5 (lima) subbagian, yaitu: Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, dan Subbagian Hukum, dengan tugas dan fungsinya masing-masing.



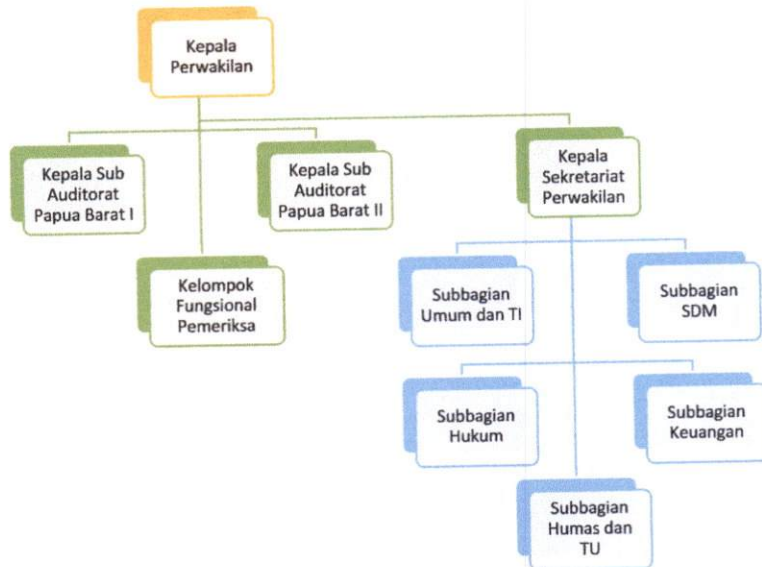
## 2. Sub Auditorat Papua Barat I

Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Manokwari Selatan, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas.

## 3. Sub Auditorat Papua Barat II

Mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas.

Secara ringkas, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dapat disajikan seperti gambar di bawah ini.



Gambar 2 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

#### **D. Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat**

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat per triwulan keempat tahun 2022 berjumlah 127 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Perwakilan, 1 orang Kepala Sekretariat Perwakilan, dan 2 orang Kepala Sub Auditorat, 5 orang Kepala Sub Bagian, 99 orang pemeriksa, dan 19 orang staf penunjang.

#### **E. Sumber Daya Keuangan**

Total Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk Tahun 2022 sebesar Rp24.810.649.000,00 dan terdiri dari satu DIPA, yaitu Nomor SP DIPA-004.01.2.445299/2022.

#### **F. Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang dihadapi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang merupakan turunan dari Renstra BPK 2020-2024 dan hasil analisa perbandingan kondisi lingkungan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat saat ini dengan kondisi lingkungan organisasi yang diharapkan. Isu-isu strategis yang menjadi perhatian oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat meliputi:

##### **1. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

Tingkat tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu ukuran kualitas atas laporan hasil pemeriksaan BPK, selain bahwa entitas sebagai pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK dalam perbaikan tata kelola keuangan yang menjadi kewenangannya. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara/daerah. Oleh sebab itu, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagai salah satu satuan kerja di BPK harus menjadikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan sebagai salah satu isu strategis yang perlu menjadi perhatian. Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan oleh entitas di lingkup kerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan berkontribusi atas capaian kinerja BPK.

##### **2. Kualitas Hasil Pemeriksaan**

Sebagai tugas pokok Badan Pemeriksa Keuangan, kualitas pelaksanaan pemeriksaan menjadi suatu hal penting yang selalu mendapat sorotan baik secara internal maupun eksternal. Kualitas pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya dapat diukur pada saat pelaksanaan pemeriksaan di entitas, tetapi kualitas pelaksanaan pemeriksaan mulai menjadi perhatian sejak perencanaan pemeriksaan dilaksanakan, pada saat pelaksanaan pemeriksaan, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan pasca pelaksanaan pemeriksaan. Kesesuaian Perencanaan Pemeriksaan merupakan tahap awal untuk mengukur kualitas pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan memiliki kualitas yang baik apabila terdapat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, terpenuhinya jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP dan ketepatan waktu penyampaian LHP sesuai perencanaan.

Selain itu, perencanaan pemeriksaan yang berkualitas juga harus bisa menjawab isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Untuk menjamin bahwa pemeriksaan yang akan dilakukan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, BPK memberikan panduan dalam menyusun rencana pemeriksaan bagi setiap satuan kerja pemeriksaannya baik melalui renstra maupun



kebijakan pemeriksaan yang saat ini dituangkan dalam tema pemeriksaan nasional. Setiap satuan kerja pemeriksaan yang ada diharapkan ikut berperan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang menjadi program pemeriksaan nasional yang telah ditetapkan.

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Hasil Pemeriksaan merupakan suatu indikator untuk melihat apakah pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai prosedur pemeriksaan, adanya *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) pemeriksaan yang memadai, pemenuhan konsistensi konstruksi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan, serta akurasi atas laporan yang disajikan dalam LHP.

Pemanfaatan hasil pemeriksaan merupakan bagian akhir untuk menilai kualitas LHP, yaitu berupa penilaian apakah laporan hasil pemeriksaan BPK (dalam hal ini BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat) telah dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sesuai visi dan misi BPK sesuai dengan kewenangannya.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di BPK khususnya di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Karenanya pengembangan pengelolaan SDM diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier, serta pelatihan dan pengembangan SDM. Untuk mampu melaksanakan hal tersebut, maka BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat perlu didukung oleh pegawai yang mempunyai kecakapan dan keahlian dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh BPK. Peningkatan Kompetensi Pegawai dilakukan baik atas tenaga pemeriksa maupun tenaga non pemeriksa.

4. Dukungan Prasarana dan Sarana Serta Teknologi Informasi Dalam Pemeriksaan

Pemenuhan dukungan sarana prasarana untuk kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas baik pemeriksaan maupun layanan manajemen dalam mendukung pemeriksaan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan.

Pada masa perkembangan teknologi yang semakin berkembang, dukungan atas sarana prasarana dan teknologi informasi tersebut akan memudahkan pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya. Integrasi sistem pengelolaan informasi berupa database administrasi pengelolaan keuangan negara, akan mendukung langkah pemeriksaan menjadi lebih mudah dan memperluas cakupan pemeriksaan. Tentunya pengembangan teknologi informasi tersebut dibarengi dengan pembaruan peralatan kerja untuk pemeriksa.

5. Kinerja Pengelolaan Anggaran

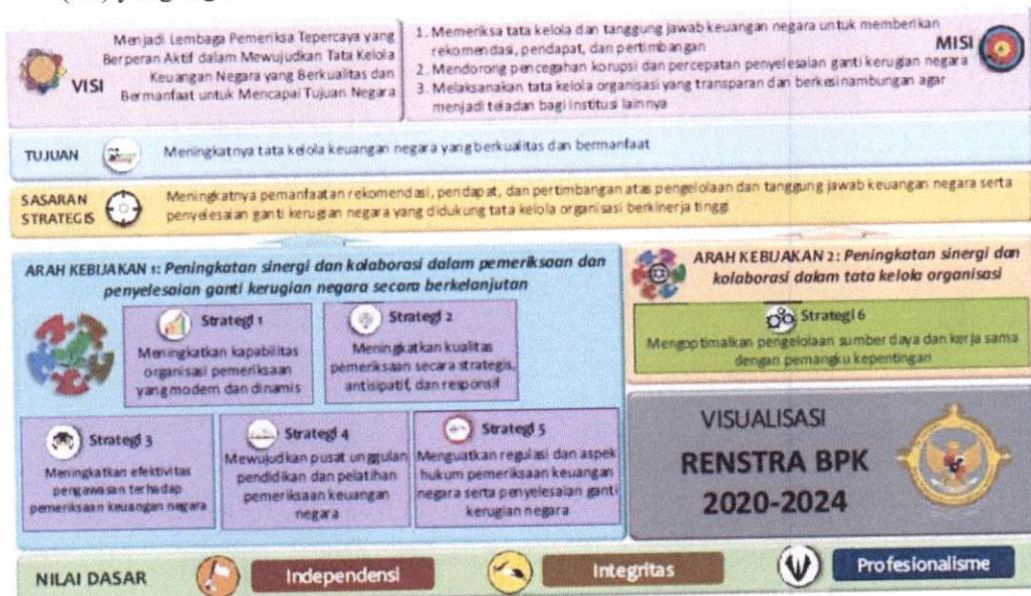
Dukungan manajemen dari sisi anggaran juga menjadi salah satu isu strategis yang layak dipertimbangkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja (*performance budget*), menekankan pada kesesuaian perencanaan dan realisasi anggaran, ketepatan penganggaran, selain juga hubungan positif antara output yang dihasilkan dengan penggunaan anggaran. Kinerja pengelolaan anggaran ini secara berkala harus dilakukan evaluasi dan diarahkan dapat mendukung pelaksanaan administrasi pemeriksaan.

## BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PAPUA BARAT

### A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Papua Barat

Renstra BPK RI 2020-2024 menetapkan visi BPK “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Visi tersebut dijabarkan kedalam misi 1) Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; 2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan 3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Sementara tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Untuk mencapai hal tersebut, BPK telah menetapkan 1 Sasaran Strategis (SS) yang digambarkan dalam bentuk peta strategis sebagai berikut.

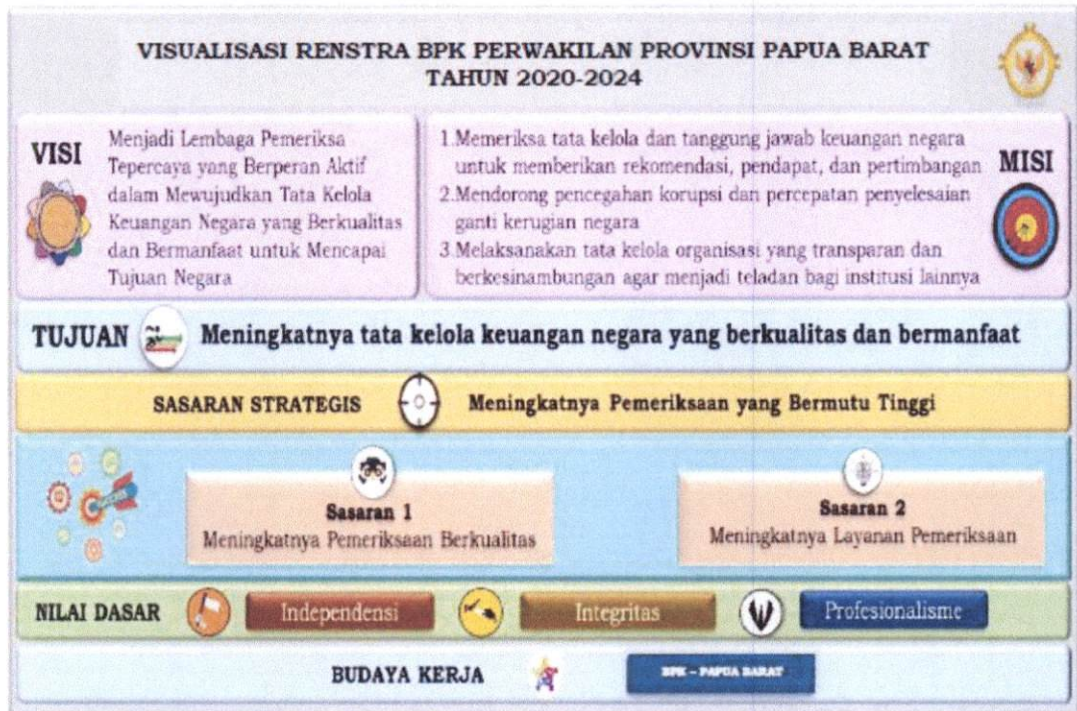


**Gambar 3 Visualisasi Renstra BPK 2020–2024**

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat yang bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama KN VI memiliki tugas dan fungsi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bermutu untuk memenuhi harapan pemilik kepentingan. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menyelenggarakan fungsi yang salah satunya merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat melalui indikator kinerja utama berdasarkan



rencana implementasi rencana strategis BPK 2020-2024. Sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi” tersebut, oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat diturunkan menjadi “Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi”. Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.



**Gambar 4 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat 2020-2024**

Dalam visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Periode 2020-2024 di atas, diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemeriksaan yang Berkualitas  
Untuk mencapai peningkatan pemeriksaan yang berkualitas, BPK menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan BPK ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan organisasi.
2. Meningkatkan Layanan Pemeriksaan  
Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan.



## B. Perjanjian Kinerja TA 2022 BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat dan Auditor Utama Keuangan Negara VI Tahun 2022 selaku atasan langsung Kepala Perwakilan. Lebih rinci target kinerja Tahun 2022 terlampir pada *Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2022*

Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat tahun 2022:

**Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</i> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas</i></li><li><i>Meningkatnya Layanan Pemeriksaan</i></li></ul>	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88%

Dibandingkan dengan IKU Tahun 2021, tidak terdapat banyak perbedaan IKU, hanya terdapat sedikit perbedaan pada bagian target IKU 8, IKU 9 dan IKU 13.

## C. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan dokumen Target Kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah melakukan penyusunan Rencana Aksi yang memuat kegiatan atau aktivitas utama per triwulan untuk mencapai target kinerja tersebut. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022 dijelaskan dengan rinci sebagaimana pada *Lampiran II*.



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PERWAKILAN PAPUA BARAT (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA PERWAKILAN PAPUA BARAT)**

#### **A. Hasil Evaluasi AKIP**

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, Inspektorat Utama (Itama) telah melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dengan tujuan untuk:

- a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c) Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;  
dan
- d) Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Utama, Implementasi SAKIP pada Tahun 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mendapatkan nilai sebesar 89,84 dengan predikat A (Memuaskan). Melalui Nota Dinas Nomor 254/ND/XI/07/2022 dari Inspektur Utama Kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat agar melakukan perbaikan terhadap implementasi komponen SAKIP dengan kegiatan berikut.

- a) Pengukuran Kinerja  
Berkoodrinas dengan Direktorat PSMK dan Biro SDM untuk melaksanakan monitoring pencapaian kinerja Eselon III, IV dan individu secara berkala.
- b) Pelaporan Kinerja  
Meningkatkan kualitas penyajian LAKIN dengan:
  - 1) Menyampaikan LAKIN kepada Direktorat PSMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 2) Menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja;
  - 3) Meningkatkan kualitas informasi mengenai perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun berjalan dengan dua tahun sebelumnya dan anatara realisasi tahun berjalan dengan target tahun periode akhir Renstra untuk seluruh indikator kinerja;
  - 4) Menyajikan informasi keuangan baik anggaran maupun realisasi yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran dan kinerja tertentu;
  - 5) Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang di kuantifikasikan untuk setiap indikator kinerja.
- c) Capaian Kinerja  
Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target yang telah ditetapkan dapat dicapai dan meningkatkan capaian kinerja tahun berjalan agar lebih baik dari capaian tahun sebelumnya.
- d) Mendokumentasikan proses tindak lanjut rekomendasi sehingga

menunjukkan perubahan sebelum dan sesudah adanya tindak lanjut serta menyampaikan dokumen tindak lanjut kepada Itama

Atas rekomendasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah menindaklanjuti dengan meningkatkan kualitas penyajian LAKIN sesuai dengan format LAKIN yang disampaikan oleh PSMK. Selain itu juga, untuk meningkatkan pencapaian target kinerja pada Tahun 2022, Kepala Perwakilan beserta seluruh pejabat struktural telah melaksanakan rapat untuk membahas terkait dengan pencapaian kinerja terutama terkait dengan pemenuhan jam diklat dan tingkat pelaksanaan manajemen pengetahuan dengan menyampaikan usulan *best practice* kepada PSMK.

## B. Capaian Kinerja Organisasi

BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN. Dengan fungsi tersebut maka Perwakilan Provinsi Papua Barat wajib mengukur tingkat pencapaian tiap tahunnya. Pada tahun 2022 Perwakilan Provinsi Papua Barat mendapat pencapaian capaian kinerja sebesar 97,09% atau mengalami kenaikan sebesar 2,33% dari tahun 2021 yang mencapai 94,76%. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 terdapat pada *Lampiran III*.

Berikut adalah *highlight* capaian Skor Kinerja secara keseluruhan untuk BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat selama lima tahun terakhir dan capaian detail IKU lainnya yang perlu mendapat perhatian perwakilan.

**Tabel 2 *Highlight* Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Lima Tahun Terakhir**

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	97,09	94,76	94,43	97,51	92,87

**Tabel 3 Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2022**

Indikator Kinerja Utama		Target 2022	Capaian 2022
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	76,67%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	70,13%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,77%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100,40%



	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Capaian 2022
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,48%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5.00)	4.62
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88.00)	89,84
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	93,79%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	87,50%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,77
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,80%
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	90,69%

Secara keseluruhan, pencapaian skor kinerja ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat 5 Indikator Kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu:
  - a. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
  - b. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan
  - c. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
  - d. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP
  - e. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran
2. Terdapat 1 Indikator Kinerja yang mencapai target yang telah ditetapkan atau sama dengan target yang telah ditetapkan, yaitu IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
3. Terdapat 7 Indikator Kinerja yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu:
  - a. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
  - b. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
  - c. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
  - d. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
  - e. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
  - f. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
  - g. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Evaluasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat atas capaian tersebut menunjukkan bahwa penyebab tidak tercapainya target dari beberapa IKU disebabkan karena beberapa faktor yang berasal dari eksternal dan internal BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat. Kendala yang dihadapi dan rencana aksi peningkatan kinerja yang akan dijalankan ke depannya adalah sebagai berikut:

**1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

**Tabel 4 Perbandingan Capaian IKU 1**

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Perbandingan Capaian		
			2022	2021	2020
IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	76,67%	76,67%	88,75%	83,93%

Belum tercapainya IKU 1 yaitu Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan yang memiliki target 100%. Pada realisasinya, pencapaian Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada Triwulan IV 2022 baru mencapai 75%, hal ini dikarenakan belum terdapat hasil evaluasi yang dikeluarkan EPP atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit pada Semester II 2022.

**2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

**Tabel 5 Perbandingan Capaian IKU 2**

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Perbandingan Capaian		
			2022	2021	2020
IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian IKU 2 yaitu Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan selama Tahun 2022 telah mencapai 100%, hal ini ditunjukkan dengan telah diterbitkannya beberapa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yakni LHP LKPD, LHP Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD dan LHP atas pemeriksaan kinerja dan DTT sehingga IKU ini telah mencapai target 100%. Capaian ini tentunya menjadi kebanggaan bagi BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dimana dengan keterbatasan jumlah tenaga pemeriksa dan keterbatasan waktu yang dimiliki, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang telah direncanakan.

**3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

**Tabel 6 Perbandingan Capaian IKU 3**

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Perbandingan Capaian		
			2022	2021	2020
IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	70,13%	70,13%	69,47%	68,62%

Belum tercapainya IKU 3 yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang memiliki target sebesar 75%. Pada realisasinya, pencapaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat pada Triwulan IV 2022 baru mencapai 70,13%, hal ini disebabkan karena keterbatasan tenaga pemeriksa pada



perwakilan, jadwal kegiatan yang harus dilakukan, dan ketidaktertiban pemerintah daerah dalam mendokumentasikan dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan pemerintah daerah terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan, dan sosialisasi berkelanjutan mengenai kewajiban dan prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada entitas.

#### 4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dala Pemeriksaan Tematik Nasional

Tabel 7 Perbandingan Capaian IKU 4

Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	Perbandingan Capaian		
				2022	2021	2020
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dala Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,77%	101,77%	100,44%	100,78%

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Selama Tahun 2022, IKU ini telah mencapai target 101,77% karena telah terdapat beberapa pemeriksaan tematik yang dilaksanakan. Diharapkan agar kedepannya BPK Papua Barat dapat terus berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional.

#### 5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Tabel 8 Perbandingan Capaian IKU 5

Indikator Kinerja		Target 2022	Realisasi 2022	Perbandingan Capaian		
				2022	2021	2020
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100,40%	100,40%	100%	100%

Indikator IKU 5 menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Selama Triwulan IV belum ada permintaan pemeriksaan baik dari Lembaga Perwakilan maupun IPH dan terdapat alokasi penambahan skor atas pemeriksaan investigative yang dilakukan pada TA 2022, sehingga realisasi IKU 5 melebihi target yang ditetapkan yakni 100,40%.

**6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

**Tabel 9 Perbandingan Capaian IKU 6**

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Perbandingan Capaian		
			2022	2021	2020
IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,48%	100,48%	100,28%	100%

Pencapaian IKU 6 yaitu Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal sebesar 100,48% karena telah terdapat beberapa pemeriksaan tematik yang dilaksanakan. Diharapkan agar kedepannya BPK Papua Barat dapat terus berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik lokal.

**7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

**Tabel 10 Perbandingan Capaian IKU 7**

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Perbandingan Capaian		
			2022	2021	2020
IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,62	4,62	4,50	4,51

Belum tercapainya IKU 7 yaitu Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK yang memiliki target Sangat Memuaskan (5,00). Pada realisasinya, hasil pengukuran survei ini baru mencapai 4,62. Diharapkan pada tahun ke depannya, para pegawai semakin memahami visi, misi serta nilai-nilai dasar BPK.

**8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP**

**Tabel 11 Perbandingan Capaian IKU 8**

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Perbandingan Capaian		
			2022	2021	2020
IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	88,00	89,84	89,84	91,17	87,04

Pencapaian IKU 8 yaitu Hasil Evaluasi AKIP sebesar 89,84 melampaui target yang ditetapkan yaitu 88,00. Diharapkan agar kedepannya akuntabilitas kinerja di BPK Papua Barat semakin meningkat.

**9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

**Tabel 12 Perbandingan Capaian IKU 9**

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Perbandingan Capaian		
			2022	2021	2020
IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%	93,79%	93,79%	99,55%	99,55%

Pencapaian IKU 9 tahun 2022 adalah 91,11%, belum mencapai target yang ditentukan, yakni 96%. Seluruh pegawai secara sadar dan optimal memanfaatkan fasilitas layanan dasar (*e-mail, e-Drive, portal*), layanan



aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Analytic*). Sistem teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh langsung terhadap kinerja BPK, sehingga setiap proses bisnis yang ada di BPK diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

#### 10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

**Tabel 13 Perbandingan Capaian IKU 10**

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Perbandingan Capaian		
			2022	2021	2020
IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	87,50%	87,50%	25%	25%

Belum tercapainya IKU 10 yaitu Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan yang memiliki target sebesar 100%. Sampai dengan Triwulan IV BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah menyelenggarakan Diklat LKPD Tahun 2022 dan mentoring CPNS, pelaksanaan *In House Training* (IHT) dan usulan *best practice* sehingga realisasi IKU ini adalah 87,50%. Diharapkan kedepannya penerapan manajemen pengetahuan di BPK Papua barat menjadi semakin lebih baik dan terdapat inovasi-inovasi baru yang dapat mendukung penerapan manajemen pengetahuan. Di tahun-tahun selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan mendorong pegawainya agar dapat memberikan proposal usulan *Best Practice* yang kelak nantinya dapat diterapkan secara universal di BPK.

#### 11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

**Tabel 14 Perbandingan Capaian IKU 11**

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Perbandingan Capaian		
			2022	2021	2020
IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,77	3,77	3,61	3,71

Belum tercapainya IKU 11 yaitu Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi yang memiliki target Sangat Memuaskan (3,80). Pada realisasinya pencapaian IKU ini yaitu sebesar 3,77 belum memenuhi target yang ditentukan. Diharapkan agar kedepannya terdapat peningkatan kualitas komunikasi.

#### 12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

**Tabel 15 Perbandingan Capaian IKU 12**

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Perbandingan Capaian		
			2022	2021	2020
IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,80%	98,80%	91,14%	94,57%

Belum tercapainya IKU 12 yaitu Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi yang memiliki target 100%. Pada realisasinya, pencapaian target

memenuhkan jam diklat baru mencapai realisasi 98,80% dikarenakan masih terdapat beberapa pegawai yang belum melaksanakan diklat selama tahun 2022. Untuk mengatasi kondisi ini, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat berkomitmen membuat perencanaan kegiatan dengan memperhatikan kewajiban pemenuhan jam diklat bagi pegawai dengan agenda kerja Sub Auditorat sehingga diharapkan setiap pemeriksa mampu memenuhi jam diklat untuk pengembangan karir dan kompetensi pemeriksa.

### 13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Tabel 16 Perbandingan Capaian IKU 13

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Perbandingan Capaian			
			2022	2021	2020	
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	90,69%	90,69%	92,05%	90,88%

Capaian IKU 13 selama tahun 2022 adalah sebesar 90,69% telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 88%. Sasaran strategis dan IKU ini merupakan upaya BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan ekonomis serta mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

#### C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target kinerja Tahun 2022 serta memberikan pelayanan prima kepada stakeholders, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat melakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa Pemanfaatan Teknologi Informasi, Efisiensi Penggunaan Anggaran, Pelaksanaan diklat atau pelatihan secara berkelanjutan, dan melakukan inovasi dalam pelayanan.

##### a) Pemanfaatan Teknologi Informasi

Salah satu pemanfaatan Teknologi Informasi yang dilakukan di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat adalah pemanfaatan media *zoom* untuk rapat atau melaksanakan pembahasan *action plan* dengan entitas. Selain itu juga memanfaatkan aplikasi persuratan Jasmin dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar dapat mengefisienkan penggunaan ATK dalam tugas sehari-hari.

##### b) Inovasi dalam Pelayanan

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menyampaikan usulan *best practice* berupa Buku Tamu Digital, hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam melakukan monitoring tamu yang datang ke BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat

#### D. Perubahan Budaya Kerja

Budaya Kerja memiliki kaitan erat dengan perilaku dalam menyelesaikan pekerjaan. Perilaku ini merupakan cerminan dari sikap kerja yang didasari oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki oleh setiap individu. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat memiliki Budaya Kerja **Papua Barat GEMILANG (Genius Milenial CemerLANG)** diharapkan dengan adanya



Budaya Kerja ini pegawai BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat menjadi individu yang kreatif, inovatif dan terus bekerja sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK yaitu Integritas, Independensi dan Profesionalisme.

#### E. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tahun 2022, sebagaimana yang telah disebutkan pada IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat memperoleh anggaran senilai Rp23.731.855.000. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran untuk meningkatnya pemeriksaan berkualitas senilai Rp12.737.197.000 dan meningkatnya layanan pemeriksaan senilai Rp10.994.658.000. Kemudian terdapat penambahan anggaran sehingga BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat memperoleh anggaran senilai Rp24.810.649.000 yang terdiri dari anggaran RKP senilai Rp11.682.707.000 dan RKSP senilai Rp13.127.942.000.

Berdasarkan anggaran Tahun 2022 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat telah merealisasikan anggaran tersebut senilai Rp24.685.542.715 atau 99,50% sebagaimana terinci pada Tabel 17.

**Tabel 17 Perbandingan Sasaran Kegiatan, Rincian Output, Anggaran dan Realisasi**

Sasaran Kegiatan dan Sasaran		Rincian Output	Indikator Rincian Output	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	Laporan Hasil Pemeriksaan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan	5.730.649.000	5.688.306.187	99,26%
		LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP atas Bantuan Keuangan pada Parpol	211.230.000	211.217.940	99,99%
		LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP oleh KAP untuk dan Atas Nama BPK	726.825.000	722.424.049	99,39%
		Bahan Perumusan Pendapat	Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat	6.482.000	6.461.000	99,68%
		Sumbangan IHPS	Tingkat Penyelesaian Input Data Hasil Pemeriksaan pada Aplikasi SMP	217.338.000	213.555.668	98,26%
		Laporan Profil Entitas	Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	11.996.000	11.923.100	99,39%
		Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tingkat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	96.689.000	95.851.040	99,13%
		Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	309.388.000	294.272.683	95,11%
		LHP Interim/Pendahuluan	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP Interim/Pendahuluan	3.194.637.000	3.194.635.936	100,00%

Sasaran Kegiatan dan Sasaran		Rincian Output	Indikator Rincian Output	Anggaran	Realisasi	%
	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Pemeriksaan	1.177.473.000	1.154.059.764	98,01%
		Layanan Manajemen Internal Perwakilan	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Manajemen Internal Perwakilan	1.799.946.000	1.794.272.137	99,68%
		Layanan Sarana Internal	Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor	-	-	
			Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	-	-	
		Layanan Prasarana Internal	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	260.700.000	260.690.584	100,00%
		Layanan Perkantoran	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	-	
			Realisasi penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.886.793.000	6.886.164.965	99,99%

#### F. Inovasi

Di era industri 4.0 dan *Big Data*, sudah banyak instansi yang menerapkan digitalisasi dalam proses pengarsipan. Data yang sudah masuk ke database maka proses penyimpanan akan semakin memudahkan siapapun pengguna yang mengakses data tersebut. Hal ini yang menjadi salah satu indikator pendorong digitalisasi database pada sistem pengarsipan tamu yang datang ke BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, guna mengoptimalisasikan Layanan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang digunakan di kantor perwakilan oleh Subbagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Tata Usaha (TU). Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam melakukan monitoring tamu yang datang ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat, dibentuklah suatu platform buku tamu digital. Pemanfaatan buku tamu digital tersebut diharapkan mempermudah staf di Subbagian Humas dan TU dalam menyimpan data tamu yang datang ke BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat melalui database buku tamu digital, tidak perlu menggunakan cara manual lagi dan meningkatkan efisiensi dalam pengarsipan data tamu serta pengiriman laporan PIK ke BPK Pusat.



## BAB IV PENUTUP

LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat ini dibuat sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dinyatakan dalam 2 sasaran strategis dan 13 indikator kinerja utama. Hal ini tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan bersama Tortama KN VI, beserta target kinerja yang ingin dicapai.

Secara umum, BPK Perwakilan Papua Barat mengalami peningkatan dalam pencapaian skor kinerja yang terlihat dari pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Papua Barat pada tahun 2022 sebesar 97,09% sedangkan pada tahun 2021 mencapai 94,76%. Pencapaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat 5 Indikator Kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu:
  - a. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional
  - b. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan
  - c. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal
  - d. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP
  - e. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran
2. Terdapat 1 Indikator Kinerja yang mencapai target yang telah ditetapkan atau sama dengan target yang telah ditetapkan, yaitu IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan
3. Terdapat 7 Indikator Kinerja yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan, yaitu:
  - a. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
  - b. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
  - c. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
  - d. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
  - e. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan
  - f. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi
  - g. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Penyusunan LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat dalam memenuhi target kinerja yang telah disepakati antara lain:

1. Keterbatasan tenaga pemeriksa maupun penunjang dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya
2. Kesadaran dan ketertiban entitas dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

Untuk mengatasi kendala tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan melakukan serangkaian upaya perbaikan yang akan dilakukan sehingga kinerja perwakilan pada tahun 2023 akan mengalami peningkatan dibandingkan dengan kinerja tahun 2022. Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh perwakilan adalah sebagai berikut:

1. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat akan berperan aktif dalam melaksanakan pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu dan meningkatkan ketelitian dan kecermatan pada saat melakukan *cross-review* LHP dan melakukan reuiu LHP secara berjenjang;
2. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut berupa menginventarisir temuan yang bersifat administratif dan finansial yang dapat segera di tindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah guna mendukung peningkatan presentase penyelesaian tindak lanjut atas hasil rekomendasi BPK;
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai BPK terkait dengan nilai-nilai dasar BPK melalui sosialisasi secara berkelanjutan;
4. Mendorong pegawai agar dapat memanfaatkan portal/*platform* yang telah disediakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
5. Memaksimalkan penerapan Manajemen Pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
6. Meningkatkan komunikasi dan kesadaran entitas untuk bersama-sama mendorong ketertiban pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; dan
7. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan beberapa informasi tambahan seperti kualitas penyelesaian pekerjaan, jadwal penyelesaian keluaran, dan jadwal diklat pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.





## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Abidin S.E., Ak., CA., CSFA.  
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat

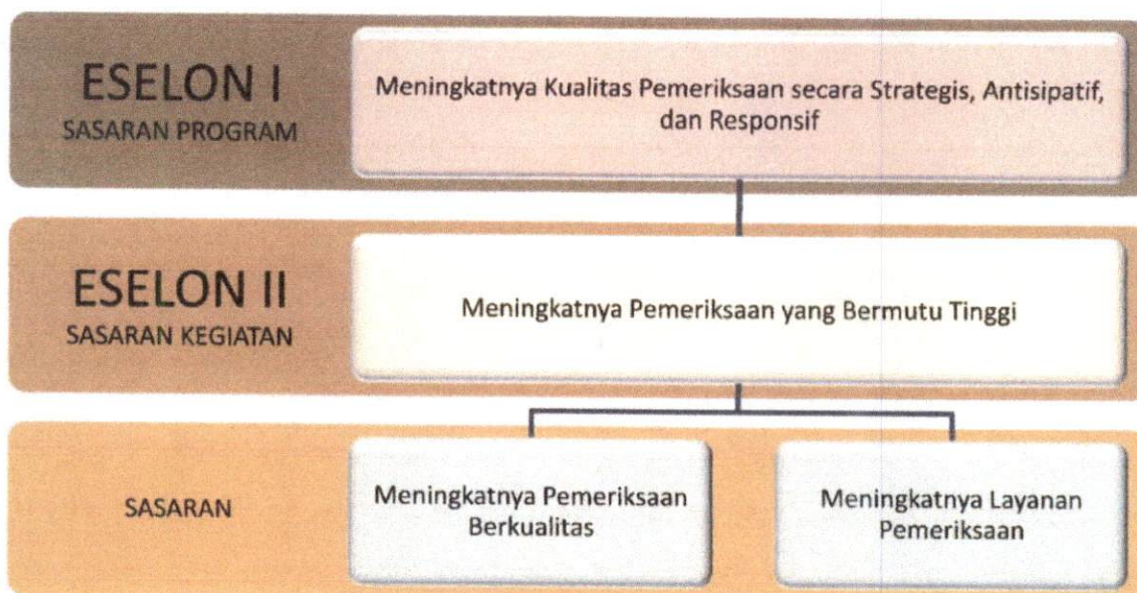
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFA.  
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Tahun 2022. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.



## INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2022


Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Rp23.731.855.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	Rp12.737.197.000	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	Rp10.994.658.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		8 Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
		9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
		10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		13 Tingkat Kinerja Anggaran	88%

Jakarta, Desember 2021

**Pihak Kedua,**

**Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA.,  
CFrA.**

**Pihak Pertama,**

  
**Muhammad Abidin S.E., Ak., CA.,  
CSFA.**

Diketahui oleh:

**Wakil Ketua,**

**Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.,  
CSFA., CPA., CFrA., QGIA.**

**Ketua,**

**Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.,  
CFrA., CGCAE., QGIA.**



# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

## RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

**Unit/Satuan Kerja : BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT**  
**Tahun : 2022**

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Diklat Pemeriksaan LKPD</li> <li>• Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Tim Pemeriksaan Pendahuluan LKPD dan LFAR</li> <li>• Melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan LKPD dan LFAR</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan kegiatan Penyusunan Tim Pemeriksaan Terinci LKPD dan LFAR</li> <li>• Melaksanakan Pemeriksaan Terinci LKPD dan LFAR</li> <li>• Melaksanakan dan mendokumentasikan <i>Quality Control (QC)</i> dan <i>Quality Assurance (QA)</i> terhadap seluruh rangkaian kegiatan pemeriksaan LKPD dan LFAR (perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan) terhadap seluruh tim</li> <li>• Melaksanakan Kegiatan Reviu Opini LKPD</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Tim Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan DTT</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan DTT</li> <li>Melaksanakan dan mendokumentasikan <i>Quality Control (QC)</i> dan <i>Quality Assurance (QA)</i> terhadap seluruh rangkaian kegiatan pemeriksaan kinerja dan DTT (perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan) terhadap seluruh tim</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Kegiatan Konsinyering Pemeriksaan Tematik Nasional dengan Kantor Pusat</li> </ul>
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat Persiapan Pemeriksaan Pendahuluan LKPD dan LFAR</li> <li>Menyusun P2 Pemeriksaan LKPD dan LFAR</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan interim LKPD dan LFAR sesuai dengan P2</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat Persiapan Pemeriksaan Terinci LKPD dan LFAR</li> <li>Menyusun P2 Pemeriksaan terinci LKPD dan LFAR</li> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Terinci LKPD dan LFAR sesuai dengan P2</li> <li>Menyusun LHP LKPD dan LFAR</li> <li>Menyerahkan LHP kepada entitas terkait</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat Penyusunan Tim Pemeriksaan Semester II</li> <li>Menyusun P2 pemeriksaan kinerja dan DTT</li> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dan DTT</li> <li>Melaksanakan Rapat Penyusunan RKP 2022</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Kegiatan Finalisasi RKP 2022</li> </ul>



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan komunikasi dengan Kepala Daerah dan Inspektur Daerah terkait pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (TLRHP BPK) pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan interim LKPD TA 2021</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan komunikasi dengan Kepala Daerah dan Inspektur Daerah terkait pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (TLRHP BPK) pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan terinci LKPD TA 2021</li> <li>Melaksanakan Kegiatan Pemantauan TLRHP Semester I dengan Entitas</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan komunikasi dengan Kepala Daerah dan Inspektur Daerah terkait pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (TLRHP BPK) pada saat <i>entry meeting</i> pemeriksaan pendahuluan dan terinci kinerja serta pemeriksaan DTT</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Kegiatan Pemantauan TLRHP Semester II dengan Entitas</li> </ul>
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	-	-	-	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci kinerja tematik nasional</li> <li>Rakor Pemeriksaan</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Kegiatan Konsinyering Pemeriksaan Tematik Nasional dengan Kantor pusat</li> <li>Menyusun LHP kinerja tematik nasional</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	TW I	TW II	TW III	TW IV	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyerahkan LHP kepada entitas</li> </ul>
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan RKP Tahun berjalan telah memenuhi kebijakan pemeriksaan BPK sebagaimana hasil Raker</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan RKP Tahun berjalan telah memenuhi kebijakan pemeriksaan BPK sebagaimana hasil Rakor</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan analisa atas RPJMD dan hasil pemeriksaan selama semester I dalam rangka penyusunan RKP TA selanjutnya</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pengarahan kepada Pelaksana oleh Kepala Perwakilan</li> <li>Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait implementasi nilai dasar BPK</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pengarahan kepada Pelaksana oleh Kepala Perwakilan</li> <li>Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait implementasi nilai dasar BPK</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pengarahan kepada Pelaksana oleh Kepala Perwakilan</li> <li>Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait implementasi nilai dasar BPK</li> </ul>



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pengarahan kepada Pelaksana oleh Kepala Perwakilan</li> <li>Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait implementasi nilai dasar BPK</li> </ul>
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	-	-	-	A (88,00)	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan bahan untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan evaluasi dari Itama tahun sebelumnya</li> <li>Menyelesaikan Laporan Akutabilitas Kinerja Tahun 2021 dan menyampaikan ke Direktorat PSMK</li> <li>Melaksanakan Rapat Berkala Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat Berkala Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat Berkala Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Rapat Berkala Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran</li> <li>Menyiapkan bahan untuk menyusun Laporan Akutabilitas Kinerja Tahun 2022</li> </ul>
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	25%	50%	75%	97%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pegawai agar memanfaatkan seluruh layanan dasar aplikasi BPK diantaranya e-mail, e-drive dan portal BPK, serta layanan aplikasi umum seperti SISDM</li> <li>Melaksanakan Rapat Berkala Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pegawai agar memanfaatkan seluruh layanan dasar aplikasi BPK diantaranya e-mail, e-drive dan portal BPK, serta layanan aplikasi umum seperti SISDM</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan TLRHP-Keruda dengan memanfaatkan aplikasi SiAP, SMP</li> <li>Melaksanakan Rapat Berkala Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul>
								<p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan sosialisasi berkelanjutan kepada seluruh pegawai agar memanfaatkan seluruh layanan dasar aplikasi BPK diantaranya e-mail, e-drive dan portal BPK, serta layanan aplikasi umum seperti SISDM</li> <li>Melaksanakan Rapat Berkala Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul>
								<p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan TLRHP-Keruda dengan memanfaatkan aplikasi SMP</li> <li>Melaksanakan Rapat Berkala Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran</li> </ul>
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	12,50%	25%	37,50%	100%	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Diklat Pemeriksaan LKPD untuk Seluruh Tim Pemeriksa</li> <li>Melaksanakan <i>In House Training</i> (IHT) untuk pegawai</li> </ul> <p>Triwulan II:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengumpulkan bahan terkait praktik-praktik yang bisa diangkat sebagai <i>best-practice</i> di perwakilan dari Subbag maupun Subaud</li> </ul> <p>Triwulan III:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan <i>Coaching</i> atau Mentoring kepada Pegawai Yuniior oleh Pegawai Senior atau Pejabat Struktural</li> <li>Memilih <i>best-practice</i> yang paling applicable dari Unit Kerja BPK lainnya sesuai data Direktorat PSMK untuk direplikasi di perwakilan</li> <li>Menyusun usulan <i>Best-Practice</i> untuk di kirimkan ke Direktorat PSMK</li> </ul> <p>Triwulan IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan usulan penerapan <i>best-practice</i> ke Direktorat PSMK</li> </ul>
IKU 11		Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	<p>Triwulan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>



Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja											Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja	
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)		(8)	(9)	
	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi															Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan survey kepuasan auditee atas pelaksanaan pemeriksaan LKPD</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	60%	65%	70%	70%	70%	75%	80%	80%	85%	90%	95%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat bagi seluruh pelaksana di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat</li> <li>Melaksanakan Diklat Pemeriksaan LKPD</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat bagi seluruh pelaksana di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat</li> <li>Melaksanakan Kegiatan Diklat sesuai Kalender Badiklat</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat bagi seluruh pelaksana di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat</li> <li>Melaksanakan Kegiatan Diklat sesuai Kalender Badiklat</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan monitoring kebutuhan diklat dan jumlah pemenuhan jam diklat bagi seluruh pelaksana di BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat</li> <li>Melaksanakan Kegiatan Diklat sesuai Kalender Badiklat</li> </ul>
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	88,00%	88,00%			88,00%			88,00%			88,00%		Desember.	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Anggaran</li> <li>Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran perwakilan agar senantiasa konsisten dengan perencanaan, mencapi output yang diharapkan dan dikelola secara efisien</li> </ul>	

Lampiran II

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan/Aktivitas yang Mendukung Pencapaian Kinerja
			TW I	TW II	TW III	TWIV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Anggaran</li> <li>Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran perwakilan agar senantiasa konsisten dengan perencanaan, mencapai output yang diharapkan dan dikelola secara efisien</li> </ul>
								Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Anggaran</li> <li>Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran perwakilan agar senantiasa konsisten dengan perencanaan, mencapai output yang diharapkan dan dikelola secara efisien</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Anggaran</li> <li>Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran perwakilan agar senantiasa konsisten dengan perencanaan, mencapai output yang diharapkan dan dikelola secara efisien</li> </ul>



## Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama		Target 2022	Capaian 2022	Perbandingan Capaian	
				Tahun 2022	Tahun 2021
<b>IKU 1</b>	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	76,67%	76,67%	88,75%
<b>IKU 2</b>	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%
<b>IKU 3</b>	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pmeriksaan	100%	70,13%	70,13%	69,40%
<b>IKU 4</b>	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dala Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,70%	101,70%	200,44%
<b>IKU 5</b>	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100,40%	100,40%	100%
<b>IKU 6</b>	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,48%	100,48%	200,28%
<b>IKU 7</b>	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5.00)	4.62	4.62	4.50
<b>IKU 8</b>	Hasil Evaluasi AKIP	A (88.00)	89,84	89,84	91,17
<b>IKU 9</b>	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	91,11%	91,11%	99,55%
<b>IKU 10</b>	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	87,50%	87,50%	25%
<b>IKU 11</b>	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,77	3,77	3.61
<b>IKU 12</b>	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	98,80%	98,80%	91,14%
<b>IKU 13</b>	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	90,69%	90,69%	92,05%